

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Keadaan Geografis Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dengan ibukota berkedudukan di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan didasarkan kesepakatan dan kebulatan tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 sampai dengan 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lembaga-lembaga adat, kaum intelektual, cerdik pandai, dan alim ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan sebagai Kabupaten yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dari Kabupaten Kampar, yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor Tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah Pelalawan

Secara geografis luas Kabupaten Pelalawan adalah 13.822,10 km², yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan.

Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya pulau Mendul (Penyalai), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, dan Pulau-Pulau kecil lainnya.

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatra yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur dan Kabupaten Karimun

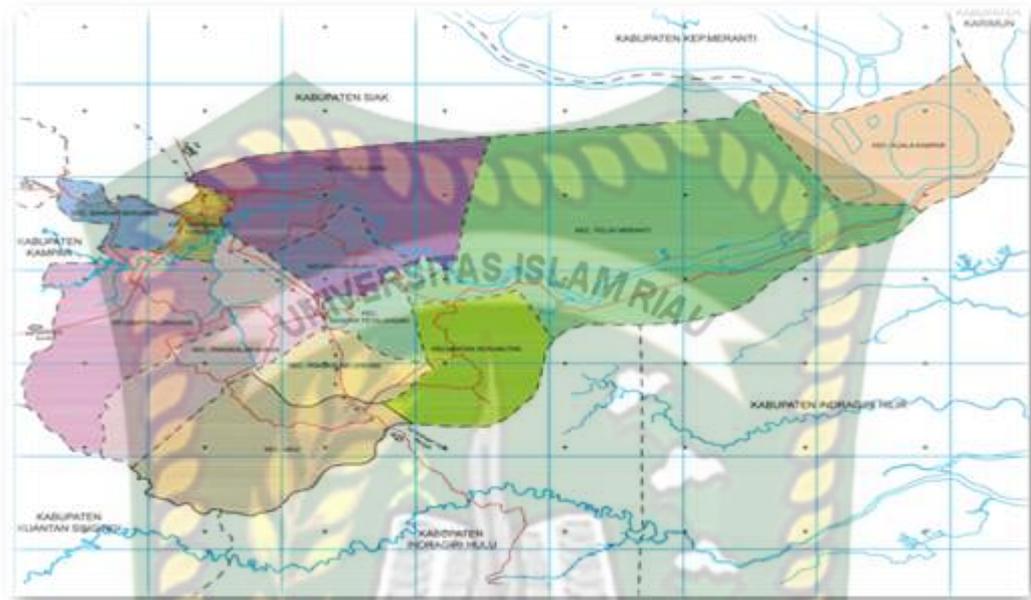
Luas wilayah Kabupaten Pelalawan sebesar 13.822,10 Km² (termasuk luas lautan) yang terdiri dari 12 kecamatan, 14 kelurahan, 104 desa, 645 RW dan 1.840 RT. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir timur pulau sumatera dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian hilir sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka, secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°20" LS serta antara 100°42" ~ 103°28" BT dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Merati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hilir;
- Sebelah Barat : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar;

➤ Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel Gambar IV.I: Lokasi Peta Kabupaten Pelalawan



Sumber: Kabupaten Pelalawan, 2018

Berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan didukung dengan 4 (empat) pemerintahan kecamatan. Pada tahun 2005 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) wilayah kecamatan.

Kedua belas kecamatan tersebut terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan, 104 desa, 645 RW dan 1.840 RT (Sumber: Pelalawan Dalam Angka 2016). Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara administratif dipimpin oleh H. M. Harris selaku Bupati dan Zardewan sebagai Wakil Bupati periode 2016-2021, hasil pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2015, yang dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Riau pada tanggal 7 April 2016. Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh)

kecamatan. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan.

Tabel IV.1 : Jumlah Luas Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

NU	Kecamatan	Kota Kecamatan	Luas Kecamatan
1	2	3	4
1	Langgam	Langgam	144.245,09 Ha
2	Bunut	Bunut	40.802,77 Ha
3	Pangkalan Kuras	Sorek 2	118.388,79 Ha
4	Kuala Kampar	Kuala Kampar	150.265,19 Ha
5	Pangkalan Kerinci	Pangkalan Kerinci	19.355,53 Ha
6	Ukui	Ukui 1	129.956,06 Ha
7	Pelalawan	Pelalawan	149.811,31 Ha
8	Pangkalan Lesung	Pangkalan Lesung	50.485,12 Ha
9	Kerumutan	Kerumutan	96.003,66 Ha
10	Teluk Meranti	Teluk Meranti	423.984,41 Ha
11	Bandar Petalangan	Bandar Petalangan	37.255,16 Ha
12	Bandar Sekijang	Bandar Sekijang	31.941,2 Ha

Sumber: Data Kabupaten Pelalawan Dalam Angka, 2018

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Adapun Visi Dan Misi Kabupaten Pelalawan yang visinya adalah “
Terwujudnya Kabupaten Pelalawan Maju Dan Sejahtera, Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Oleh Pertanian Yang Unggul Dan Industri Yang Tangguh Dalam Masyarakat Yang Beradat, Beriman, Bertaqwa Dan Kebudayaan Melayu Tahun 2030 “ , Rumusan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

1. Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera ;
2. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan ;
3. Pertanian yang unggul ;
4. Industri yang tangguh ;
5. Masyarakat beriman dan bertaqwa serta bebudaya melayu.

Sedangkan Misi Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya
2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan ;
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari ;
4. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan ;
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan berjumlah 428.150 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 219.754 jiwa (51,33%) dan perempuan sebesar 208.396 jiwa (48,67%) dengan 103.164 kepala keluarga.

Tabel IV.2. Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin Per Kecamatan Di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah KK	Penduduk				Jiwa/ km ²
				Laki-laki	Perem.	Jumlah	%	
1	Langgam	1,453.07	7,325	16,119	15,128	31,247	7.30	21.50
2	Pangkalan Kerinci	195.32	28,333	61,416	58,922	120,338	28.11	616.11
2	Bandar Sei Kijang	306.87	7,945	18,306	17,080	35,386	8.26	115.31
4	Pangkalan Kuras	1,200.08	14,557	30,727	29,248	59,975	14.01	49.98
5	Ukui	1,345.19	10,067	20,853	18,924	39,777	9.29	29.57
6	Pangkalan Lesung	509.29	8,056	16,611	15,504	32,115	7.50	63.06
7	Bunut	423.00	3,943	7,887	7,760	15,647	3.65	36.99
8	Pelalawan	1,482.65	4,844	10,379	9,476	19,855	4.64	13.39
9	Bandar Petalangan	372.31	3,631	7,161	7,127	14,288	3.34	38.38
10	Kuala Kampar	698.36	4,288	9,218	8,873	18,091	4.23	25.90
11	Kerumutan	956.84	6,045	12,304	11,815	24,119	5.63	25.21
12	Teluk Meranti	4,212.82	4,130	8,773	8,539	17,312	4.04	4.11
	Jumlah	13,155.79	103,164	219,754	208,396	428,150	100.00	32.54

Sumber: Data jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Penyebaran penduduk tidak merata di setiap kecamatan. Penyebaran penduduk yang paling padat sebesar 616,11 jiwa/km² berada pada Kecamatan Pangkalan Kerinci dan yang paling jarang sebanyak 4,11 jiwa/km² di Kecamatan Teluk Meranti. Tingkat rata-rata penyebaran penduduk dibandingkan luas wilayah Kabupaten Pelalawan adalah 32,54 jiwa/km². Untuk mendorong penyebaran penduduk yang lebih merata pada masing-masing kecamatan, pemerintah daerah akan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan yang baru di kecamatan yang penduduknya masih jarang dan yang memiliki keunggulan ekonomis serta potensi daerah.

A. Gambaran Umum Federasi Serikat Pekerja, Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (SPSI NIBA) Kabupaten Pelalawan

1. Profil Singkat Federasi Serikat Pekerja, Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (SPSI NIBA) Kabupaten Pelalawan

SPSI NIBA kabupaten pelalawan terbentuk pada tahun 1991, pada awalnya SPSI NIBA masih berada dikabupaten kampar. hanya memiliki jumlah anggota yang jumlahnya sedikit dikarenakan masih belum berkembangnya perekonomian di daerah tersebut. dan setelah majunya perkembangan zaman maka terjadinya pemekaran kabupaten yang menjadi kabupaten pelalawan pada tahun 1999. Setelah terbentuknya kabupaten pelalawan maka perkembangan ekonomi di pangkalan kerinci sebagai pusat kota kabupaten semakin meningkat dimana sudah banyak pembangunan dan pusat perdagangan oleh sebab itu dari perkembangan tersebut membuat SPSI NIBA semakin dilirik oleh masyarakat sebagai wadah untuk manampung aspirasi para pekerja dikabupaten pelalawan. Dari hal tersebut maka masyarakat mulai ikut bekerja melalui SPSI NIBA di

pangkalan kerinci kabupaten pelalawan. pada saat ini Kantor Dan Pimpinan Cabang SPSI NIBA berlokasi di jalan Datuk engku raja lela putra (mess pemda) komplek perumahan GSA Blok C no 9 pangkalan kerinci. Dan memiliki Kantor Pimpinan Unit Kerja yang berlokasi di jalan maharaja indra pangkalan kerinci.

2. Fungsi, Tujuan Dan Usaha Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Niaga, Bank, Jasa Dan Asuransi Kabupaten Pelalawan.

Selain itu SPSI NIBA Kabupaten Pelalawan juga mempunyai fungsi, diantaranya yaitu :

Fungsi :

1. Sebagai wadah berhimpun dan bergabungnya organisasi serikat pekerja dari sektor usaha niaga, bank, jasa dan asuransi.
2. Sebagai wadah perjuangan pekerja dan organisasi pekerja dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
3. Sebagai wadah berkomunikasi, koordinasi, dan penyalur aspirasi serikat pekerja dan pekerja, dalam mengembangkan hak-hak kewajiban pekerja
4. Sebagai wadah perjuangan kepentingan serikat pekerja dan pekerja dalam meningkatkan derajat, taraf hidup yang berkeadilan serta kesejahteraan sosial
5. Mewakili kepentingan seluruh serikat pekerja dan pekerja dalam pelaksanaan hubungan industri yang harmonis, dinamis dan keadilan
6. Mewakili kepentingan seluruh serikat pekerja dan pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan dilingkungan nasional dan internasional
7. Sebagai perekat kemajemukan serikat pekerja untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas antara pekerja
8. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggungjawab pemogokan serikat pekerja, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

Tujuan :

1. Memperjuangkan dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial ekonomi bagi pekerja dan keluarganya
2. Membengi perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan serikat pekerja dan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya

3. Mewujudkan persatuan dan solidaritas antara serikat pekerja dan pekerja
4. Mewujudkan serikat pekerja dan pekerja yang sadar akan hak dan kewajiban dalam hubungan industrial
5. Meningkatkan kemitraan dan kesetaraan antara serikat pekerja dengan pihak pengusaha
6. Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperjuangkan perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja serta penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab

Usaha :

1. Memantapkan dan meningkatkan kualitas komunikasi secara vertikal dan horizontal antara serikat pekerja, pekerja dan pengusaha
2. Memantapkan peran konsolidasi organisasi secara vertikal dan horizontal dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran serikat pekerja
3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan serta kaderisasi disetiap jenjang organisasi federasi SPSI NIBA
4. Mengusahakan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik bagi serikat pekerja maupun pekerja
5. Mengadakan kerjasama dengan badan dan atau lembaga-lembaga pemerintah/swasta, baik dalam maupun luar negeri
6. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan mendirikan koperasi, yayasan atau bentuk usaha lainnya
7. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi pekerja
8. Menyelenggarakan advokasi, pembelaan bagi serikat pekerja dan pekerja
9. Mengembangkan hubungan kemitraan dan kesetaraan kepada semua pihak untuk kepentingan serikat pekerja dan pekerja

3. Susunan Struktur Organisasi Dan Kewenangan Serta Kewajiban Dewan Pimpinan SPSI NIBA Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan keputusan musyawarah nasional II federasi serikat pekerja, niaga, bank, jasa dan asuransi tahun 2012 nomor : VI/MUNAS II/FSP.NIBA/VI/2012. BAB VIII tentang struktur organisasi dan wewenang serta kewajiban dewan pimpinan federasi SP NIBA.

Struktur organisasi federasi SP NIBA terdiri:

1. Tingkat nasional berkedudukan diibu kota negara dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat federasi serikat pekerja niaga, bank, jasa dan asuransi disingkat: DPP federasi sp niba
2. Tingkat provinsi berkedudukan diibu kota provinsi dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah federasi serikat pekerja niaga, bank, jasa dan asuransi disingkat : DPD federasi sp niba
3. Tingkat kabupaten/kota berkedudukan diibu kota kabupaten dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang federasi serikat pekerja niaga, bank, jasa dan asuransi disingkat : DPC federasi sp niba

Wewenang dan kewajiban Dewan Pimpinan Pusat :

1. Dewan Pimpinan Pusat Federasi sp niba adalah badan pelaksana tertinggi organisasi, merupakan suatu kesatuan yang bersifat kolektif
2. Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi tingkat nasional sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat tingkat nasional serta keputusan – keputusan lain dari federasi sp niba
 - b. Mengesahkan komposisi dan personalia dewan pimpinan daerah federasi sp niba
 - c. Mengesahkan komposisi dan personalia dewan pimpinan cabang federasi sp niba, disebabkan oleh belum tentunya dewan pimpinan daerah federasi sp niba

- d. Mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan sp niba anggota, disebabkan belim terbentuknya dewan pimpinan daerah maupun dewan pimpinan cabang federasi sp niba

3. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat tingkat nasional serta keputusan-keputusan lain dari federasi sp niba
- b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah nasional
- c. Menyelesaikan perbedaan pendapat didalam tubuh serikat pekerja anggota dan atau perselisihan antara serikat pekerja dan pekerja
- d. Memperjuangkan, membela kepentingan dan hak-hak anggota dalam forum nasional dan internasional
- e. Mengkoordinir dan membina serikat pekerja anggota secara nasional
- f. Memberikan nomor keanggotaan terhadap sp niba sebagai serikat pekerja anggota yang telah memenuhi ketentuan federasi sp niba

Wewenang dan kewajiban Dewan Pimpinan Daerah :

1. Dewan pimpinan daerah federasi sp niba adalah badan pelaksanaan organisasi yang bersifat kolektif didaerah provinsi
2. Dewan pimpinan daerah berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi dibawah wilayah daerah provinsi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi serta peraturan lain dari federasi sp niba
 - b. Bertindak untuk dan atas nama DPP federasi sp niba mengesahkan komposisi dan personalia dewan pimpinan cabang federasi sp niba

- c. Bertindak untuk dan atas nama DPP fedrasi sp niba mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan sp niba, disebabkan oleh belum terbentuknya dewan pimpinan cabang federasi sp niba

3. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban :

- a. Melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat, baik ditingkat nasional maupun daerah provinsi serta peraturan lain dari federasi sp niba
- b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah daerah federasi sp niba
- c. Menyelesaikan perbedaan pendapat didalam tubuh serikat pekerja anggota dan atau perselisihan antara serikat pekerja
- d. Memperjuangkan, membela kepentingan dan hak-hak anggota dalam forum daerah
- e. Mengkoordinir dan membina sp niba dan anggotanya diwilayah provinsi

Wewenang dan kewajiban Dewan Pimpinan Cabang ;

- 1. Dewan pimpinan cabang federasi sp niba adalah badan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif diwilayah kabupaten/kota
- 2. Dewan pimpinan cabang berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi diwilayah kabupaten/kota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah dan rapat-rapat, baik ditingkat nasional, daerah maupun cabang serta peraturan lainnya dari federasi sp niba
 - b. Bertindak untuk dan atas nama DPP federasi sp niba mengesahkan komposisi dan personalia pimpinan sp niba
- 3. Dewan Pimpinan Cabang kabupaten/kota berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan

- musyawarah dan rapat-rapat, baik ditingkat nasional, daerah maupun cabang serta peraturan lain dari federasi sp niba
- b. Melaksanakan dan memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah cabang federasi sp niba
 - c. Menyelesaikan perbedaan pendapat didalam tubuh serikat pekerja anggota dan atau perselisihan antara serikat pekerja
 - d. Memperjuangkan, membela kepentingan hak-hak anggota dalam forum kabupaten/kota
 - e. Mengkoordinir dan membina sp niba dan anggotanya diwilayah kabupaten/kota

Anggota berkewajiban :

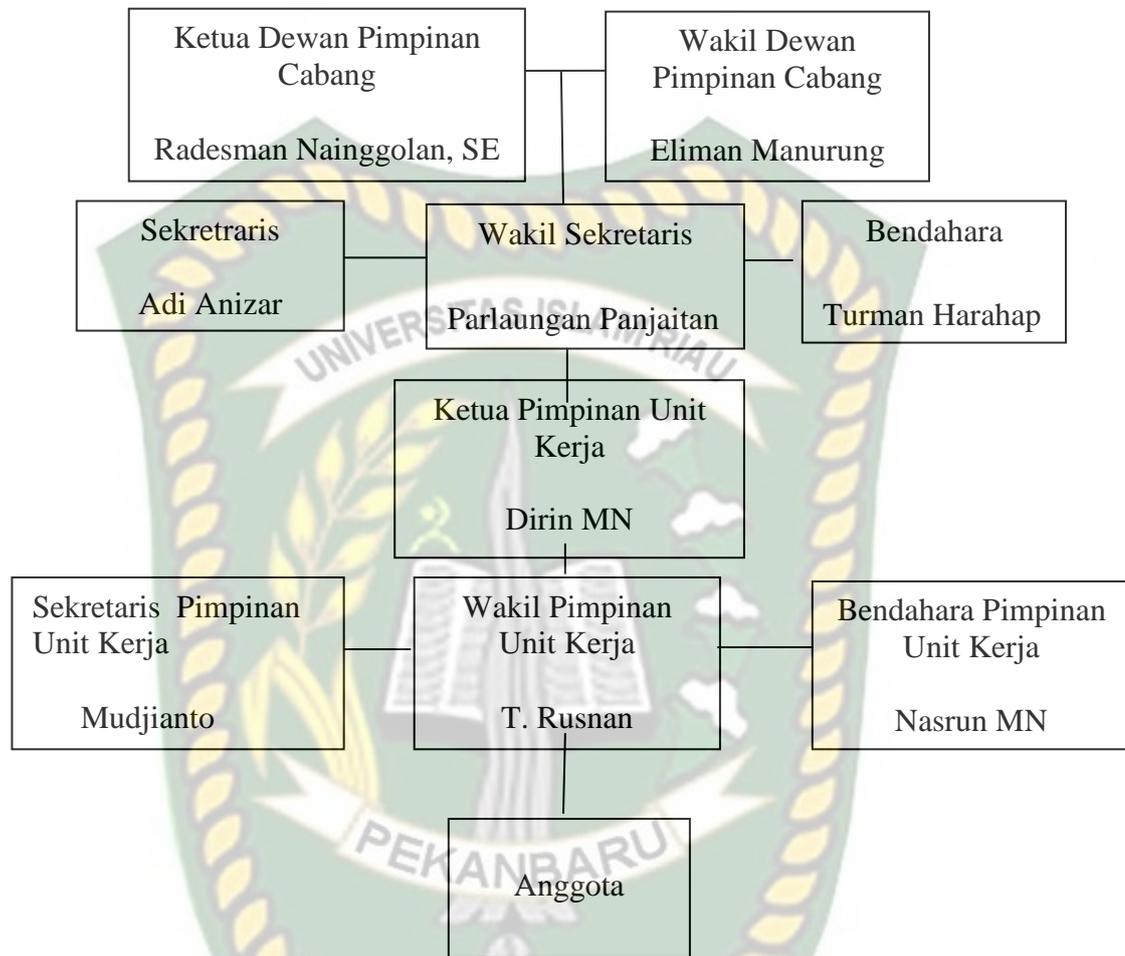
1. Menaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggran rumah tangga serta keputusan-keputusan federasi sp niba
2. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan federasi sp niba
3. Melaksanakan program-program federasi sp niba
4. Membayar uang pangkal dan iuran anggota
5. Melakukan koordinasi dengan federasi sp niba, terhadap segala bentuk perkembangan organisasi sp niba sesuai mekanisme organisasi
6. Menghadiri musyawarah dan rapat-rapat serta kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi

Setiap anggota federasi sp niba memiliki wewenang :

1. Menangani fungsi hubungan industri dalam arti yang luas sebagaimana diatur dalam anggran dasar dan anggaran rumah tangga sp niba dan perundang-undangan yang berlaku
2. Menindak lanjuti keputusan-keputusan federasi sp niba

Untuk melihat bagaimana struktur organisasi dari SPSI NIBA pangkalan kerinci kabupaten pelalawan sebagai berikut :

Tabel Gambar IV.3 : Struktur Organisasi SPSI NIBA Kabupaten Pelalawan



Sumber: Kantor DPC pangkalan kerinci kabupaten pelalawan 2018